

364-106

SH

P

**PRAKTEK-PRAKTEK PERSAINGAN  
TIDAK SEHAT SEBAGAI BENTUK  
KEJAHATAN KORPORASI**

**OLEH :  
RB SULARTO, SH**

**BAGIAN HUKUM PIDANA FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS DIPONEGORO  
SEMARANG  
1995**

## PRAKTEK-PRAKTEK PERSAINGAN TIDAK SEHAT SEBAGAI BENTUK KEJAHATAN KORPORASI

### PENDAHULUAN

Sejak dicanangkannya pembangunan lima tahunan tahap pertama (Pelita I), titik berat perencanaan dan pelaksanaan pembangunan di Indonesia difokuskan pada pembangunan bidang ekonomi. Perencanaan pembangunan untuk menitikberatkan pada bidang perekonomian ini dapat dimengerti mengingat situasi perekonomian pada masa-masa peralihan kekuasaan, yaitu dari pemerintahan orde lama kepada pemerintahan orde baru, sudah sangat parah. Bahkan ketika itu, inflasi yang terjadi sudah melebihi dari 600 % per tahunnya.

Kondisi perekonomian nasional yang sangat parah tersebut, mengakibatkan pemerintah orde baru tidak mempunyai pilihan lain, kecuali menitikberatkan pembangunan bidang ekonomi dan mendorong secara maksimal partisipasi masyarakat dalam melaksanakan pembangunan. Sejak tahun 1967 tersebut, Indonesia secara resmi menganut sistem perekonomian terbuka dan sejak saat itu masyarakat (swasta) diberi peran yang sangat besar dalam kehidupan perekonomian nasional. Untuk mengurangi dampak negatif dari keikutsertaan pihak swasta dalam pembangunan, pemerintah telah menetapkan rambu-rambu dalam penyelenggaraan pembangunan nasional yang antara lain bahwa partisipasi swasta tersebut harus selalu mengarah kepada terwujudnya demokrasi ekonomi yang berdasarkan Pancasila. Dalam demokrasi ekonomi yang berdasarkan Pancasila harus dihindarkan hal-hal yang bersifat negatif seperti sistem free fight liberalism, sistem etatisme, persaingan tidak sehat serta pemusatan kekuatan ekonomi pada satu kelompok.

Pemusatan kekuatan ekonomi pada satu kelompok yang pada akhirnya menciptakan persaingan tidak sehat dan

melahirkan berbagai bentuk monopoli, monopsoni dan oligopoli telah disadari akan mengakibatkan kerugian pada masyarakat dan bertentangan dengan cita-cita keadilan sosial. Pemusatan kekuatan ekonomi meskipun telah disadari akan menimbulkan kerugian pada masyarakat, namun praktek-prakteknya masih saja dijumpai dalam berbagai bidang perekonomian. Beberapa contoh bidang perekonomian yang dimonopoli oleh satu kelompok kekuatan ekonomi antara lain dalam bidang industri semen, industri kertas, makanan ternak, perdagangan tanaman pertanian, tata niaga cengkeh, tata niaga jeruk, dan beberapa sektor lain yang sangat dekat dengan kehidupan perekonomian rakyat kecil.

Monopoli, monopsoni dan oligopoli<sup>1</sup> adalah bentuk-bentuk persaingan tidak sempurna yang hampir dijumpai di setiap sistem perekonomian di dunia ini. Meskipun menurut ilmu ekonomi istilah-istilah tersebut tidak selalu berdampak negatif.

Perkembangan batasan monopoli tidak lagi dalam arti mekanistik, tetapi telah beralih kepada pengertian yang bersifat stokastik. Maka mono tidak lagi sekedar satu, tetapi termaktub pengertian peluang. Artinya beberapa perusahaan dalam industri menguasai pasar suatu barang atau jasa yang dapat menyatukan perilaku. Jadi bukan terbatas pada batasan satu-satunya penjual atau produsen. Oleh karena itu dapat terjadi, dan memang telah terjadi, struktur pasar barang oligopoli sekaligus menjadi monopoli. Teori-teori ekonomi mikro yang menjelaskan hubungan struktur, perilaku dan kinerja industri, yang mula-mula berkembang adalah perilaku

---

1. Penjelasan ketiga istilah tersebut menurut **Black's Law Dictionary** antara lain adalah sebagai berikut :

- Monopoly : A form of market structure in which one or only a few firms dominate the total sales of a product or service.
- Monopsony : A condition of the market in which there is but one buyer for a particular commodity.
- Oligopoly : Economic climate existing where a few seller sell only a standardized product.

oligopoli yang nonkolusi. tetapi setelah para ahli melakukan penelitian. maka kejadian-kejadian yang membuktikannya jarang terjadi. Struktur pasar barang oligopoli yang kolusi yang sering terjadi<sup>2</sup>.

Bila diamati lebih lanjut, praktek-praktek persaingan tidak sehat dipandang sangat tidak cocok bukan saja karena di dalamnya terkandung praktek kolusi namun sistem perekonomian kita sendiri telah mendasarkan diri pada asas kekeluargaan, yang sudah tentu sangat bertentangan dengan praktek-praktek persaingan tidak sehat tersebut.

Praktek-praktek persaingan tidak sehat dalam berbagai bentuknya ini perlu mendapat perhatian serius dari semua pihak khususnya pemerintah, mengingat masalah ini merupakan salah satu bentuk kejahatan di bidang perekonomian dan telah menimbulkan kerugian yang tidak sedikit bagi masyarakat luas. Dunia internasional sendiri sudah memberikan perhatian khusus terhadap masalah kejahatan ekonomi ini, hal ini terbukti dengan adanya rekomendasi tentang perluasan pengertian kejahatan dalam Kongres Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Pencegahan Kejahatan dan Pembinaan Para Pelanggar yang diselenggarakan di Genewa pada bulan September 1975 yang antara lain mencakup tindakan "Penyalahgunaan Kekuasaan Ekonomi Secara Melawan Hukum (Illegal Abuses of Economic Power)" dengan salah satu bentuknya adalah penyelewengan bidang pemasaran dan perdagangan.

Alasan lain sebagai dasar untuk memberi perhatian serius terhadap praktek-praktek persaingan tidak sehat ini adalah karena persaingan tidak sehat telah menimbulkan penyalahgunaan wewenang oleh alat penguasa dalam bentuk persekongkolan (kolusi) antara pengusaha dan penguasa.

---

2. Nurimansjah Hasibuan. "Implikasi Struktur Pasar Industri Oligopoli di Indonesia," Sistem Ekonomi dan Demokrasi Ekonomi. Sri Edi Swasono(Jakarta, 1987), hal 267-268.

## PERMASALAHAN

Beberapa permasalahan yang dapat dikemukakan berkaitan dengan timbulnya praktek-praktek persaingan tidak sehat dalam dunia bisnis ini antara lain adalah :

1. Sampai seberapa jauhkah praktek-praktek tidak sehat dalam dunia bisnis ini telah merugikan masyarakat ?
2. Upaya-upaya apakah yang dapat dan sebaiknya ditempuh untuk mengantisipasi praktek-praktek persaingan tidak sehat dalam dunia bisnis ini ?

## PERSAINGAN TIDAK SEHAT DALAM BIDANG PEREKONOMIAN

Pembangunan jangka panjang yang telah direncanakan oleh Indonesia telah menempatkan bidang ekonomi sebagai titik berat pembangunan, dengan membangun sektor industri disertai sektor pertanian yang tangguh. Kebijakan ini di satu sisi telah melahirkan berbagai macam industri mulai dari industri hulu hingga industri hilir dan disisi lain telah merubah struktur masyarakat, yaitu yang pada awalnya merupakan masyarakat agraris menjadi masyarakat industri dan perdagangan yang mempunyai ciri yang berbeda. Beberapa ciri masyarakat industri dan perdagangan<sup>3</sup> ialah :

- (a) meningkatnya kebutuhan akan modal dalam jumlah yang besar menyebabkan meningkatnya usaha-usaha untuk mengumpulkan dan meletakkan pemilikan (uang) di tangan "orang" lain.
- (b) perubahan dalam pola pemilikan, yakni dari milik yang dapat dilihat seperti tanah, rumah, ke dalam kekuasaan dan hak-hak yang tidak nampak seperti saham dan surat-surat berharga lainnya,
- (c) terjadinya perpindahan kepemilikan, yakni dari milik pribadi ke milik korporasi,
- (d) kegiatan ekonomi yang berorientasi ke pasar (internasional),
- (e) semakin meluas dan berkuasanya korporasi sebagai pelaku dalam kehidupan ekonomi dan sosial.
- (f) semakin meluas dan berkuasanya korporasi, baik sebagai pelaku ekonomi maupun dalam kehidupan sosial pada umumnya.

Secara konseptual, kejahatan yang menyangkut korporasi perlu dibedakan antara :

- (a) kejahatan korporasi, yaitu yang dilakukan oleh kor-

---

3. I.S. Susanto. "Kejahatan Korporasi," Makalah Seminar Nasional Hukum Pidana dan Kriminologi (Semarang, 1993), hal. 3-4.

porasi dalam usahanya mencapai tujuan korporasi untuk memperoleh keuntungan:

- (b) korporasi jahat, yaitu korporasi yang bertujuan semata-mata untuk melakukan kejahatan (dalam hal ini korporasi dipakai sebagai alat atau kedok untuk melakukan kejahatan);
- (c) kejahatan terhadap korporasi, seperti pencurian atau penggelapan terhadap milik korporasi, disini yang menjadi korban justru korporasi sendiri.

Dengan demikian pengertian kejahatan korporasi terutama menyangkut tindakan-tindakan korporasi yang merugikan masyarakat luas dalam usahanya mencapai tujuannya yaitu mencari keuntungan (yang sebesar-besarnya).<sup>4</sup>

Sebagai pelaku ekonomi, kekuasaan korporasi sangat besar dan bahkan dapat dikatakan telah menguasai kehidupan manusia sehari-hari. Kebutuhan hidup manusia sehari-hari tidak lepas dari produk-produk yang dihasilkan oleh korporasi. Peranan yang sangat dominan dari korporasi ini sering mendorong para pengelola korporasi atau pelaku-pelaku bisnis (terutama yang besar/konglomerat) untuk menguasai pasar dan menentukan harga sekehendaknya demi mencapai keuntungan yang sebesar-besarnya. Dengan adanya monopoli terhadap suatu produk tertentu, maka akan membuka kemungkinan terjadinya penentuan harga yang sewenang-wenang oleh produsen yang mengakibatkan masyarakat atau konsumen harus membayar harga produk tersebut lebih mahal dan tentunya ini sangat merugikan masyarakat atau konsumen. Penguasaan pasar atau monopoli dan monopsoni ini terutama dilakukan terhadap produk-produk yang banyak dibutuhkan oleh masyarakat luas seperti terigu, semen, serta beberapa bentuk tata niaga seperti tata niaga cengkeh dan jeruk. Pengusaha-pengusaha kecil yang sebenarnya juga mampu untuk berperan dalam

---

4. I.S. Susanto. "Kejahatan White Collar dan Pembangunan Masyarakat Adil dan Makmur," Masalah-Masalah Hukum. (Semarang, 1991), hal. 3-4.

1

2

3

4



pengadaan produk tersebut (bahkan produk yang sepele), sama sekali tidak mendapat kesempatan, karena semuanya sudah dikuasai oleh pengusaha-pengusaha besar.

Masih segar dalam ingatan kita, beberapa waktu yang lalu terjadi krisis semen yang berulang-ulang dan mengakibatkan harganya membumbung tinggi sehingga sangat memberatkan masyarakat luas yang membutuhkan semen. Krisis tersebut tidak saja mengakibatkan terhambatnya proyek-proyek dalam skala kecil yang dilakukan oleh masyarakat luas, namun juga proyek-proyek skala besar yang menyentuh kebutuhan masyarakat banyak seperti pengadaan rumah murah dan sebagainya.

Demikian pula contoh lain seperti misalnya tata niaga cengkeh yang hingga kini masih merugikan para petani akibat anloknya harga cengkeh di pasaran. Tidak ada lagi kebebasan bagi petani untuk menjual cengkehnya pada pihak pembeli yang dikehendakinya, karena pembelinya sudah ditetapkan oleh pemerintah (BPFC melalui KUD). Hal yang sangat disayangkan pembeli yang sudah ditentukan tersebut kerap menolak cengkeh yang hendak dijual petani dengan alasan stoknya sudah berlebihan. dana dari Bank belum cair<sup>5</sup> dan alasan-alasan lainnya. Para petani tidak berani menjual kepada pihak lain karena dapat berakibat didakwa melakukan tindak pidana yaitu melanggar ketentuan tentang tata niaga yang ada (Keppres Nomor 20 tahun 1990). Kondisi yang demikian mengakibatkan petani tidak lagi bergairah dan enggan menangani tanaman yang pernah menjadi primadona itu.

Monopoli dalam bidang tata niaga tidak hanya terjadi pada tanaman cengkeh, tetapi juga terjadi pada tata niaga buah jeruk. Bahkan menurut Dorodjatun Kuntjoro Jakti<sup>6</sup>, praktek tata niaga yang selama ini terjadi cenderung

---

5. Suara Merdeka. Petani Cengkeh Candiroto Bingung (Semarang, 12 September 1995), hal. XI.

6. Suara Merdeka. Tata Niaga Cenderung Monopoli dan Oligopoli (Suara merdeka, 15 September 1995), hal. X.

dominasi itu.

Gambaran tentang negara-negara Barat yang sudah menerapkan undang-undang antimonopoli, sudah selayaknya menjadi pendorong bagi negara kita untuk menerapkan hal yang sama. Apabila hal tersebut tidak segera dilaksanakan, maka kondisi perekonomian Indonesia akan sangat rawan mengingat pada awal abad ke-21 ini Indonesia sebagai akibat pengaruh globalisasi ekonomi sudah bertekad untuk berpartisipasi dalam perdagangan bebas dunia.

Memang pada akhir-akhir ini pemerintah sedang mempersiapkan dan mengajukan Rancangan Undang-Undang tentang Pengusaha Kecil untuk dibahas di Dewan perwakilan Rakyat. Banyak pihak yang menilai bahwa RUU Pengusaha Kecil tersebut kurang komprehensif dan menyentuh akar permasalahan yang sebenarnya. Dalam RUU tersebut tidak ada substansi yang dapat mencegah timbulnya praktek monopoli, oligopoli dan kartel, yang selama ini dinilai merugikan para pengusaha kecil pada umumnya. Mengingat adanya kelemahan seperti itu, banyak pakar yang mengusulkan agar RUU tersebut ditarik kembali untuk direvisi, namun sayangnya dengan tegas pemerintah menolak usul tersebut.

Apabila dilihat dengan menggunakan pendekatan kriminologi kritis, maka dapat kita duga bahwa pengajuan RUU tersebut tidak lepas dari muatan-muatan politis. **Chamblis** dan **Seidman**<sup>8</sup> sehubungan dengan kebijakan legislatif ini telah menyimpulkan bahwa kejahatan bukan lagi merupakan persoalan moral, melainkan masalah yang bersifat politik, karena undang-undang (pidana) seringkali merupakan jalan untuk menangani kepentingan dan kebutuhan sosial dari kelompok yang berkuasa. Dengan demikian mungkin kita dapat memprediksi bahwa kelahiran undang-undang pengusaha kecil ini tidak akan jauh berbeda dengan undang-undang perbankan ataupun undang-undang lalu lintas dan angkutan jalan.

Untuk mengatasi berbagai persoalan penyimpangan bisnis

---

8. I.S. Susanto. Diktat Kriminologi (Semarang, 1992). hal. 56.

mengarah pada monopoli dan oligopoli, terutama tata niaga bahan baku.

Persaingan tidak sehat ini apabila dikaji lebih lanjut muncul sebagai akibat salah satunya adalah dari kebijakan yang telah dikeluarkan oleh pemerintah sendiri. Oleh karena itulah sudah saatnya bagi pemerintah untuk mengkaji ulang kebijakan-kebijakan yang telah dikeluarkannya dan segera mengeluarkan kebijakan yang baru sehingga tidak merugikan rakyat.

Pembuat kebijakan legislatif sudah saatnya bertindak untuk mencegah semakin meluasnya kekuasaan korporasi. Beberapa pakar berpendapat bahwa kondisi perekonomian di Indonesia sudah lebih kapitalis dibanding dengan negara yang kapitalis dan liberalis itu sendiri, karena di Indonesia sudah sangat umum terjadi suatu korporasi raksasa menunjukan keserakahannya yang luar biasa. Hal ini sangat berlainan dengan negara-negara Barat yang menerapkan ekonomi pasar yang terarah dan terkendali. Kekuatan pasar<sup>7</sup>, individu dan bisnis diberi hak dan kesempatan seluas-luasnya untuk menjadi kaya, besar dan raksasa. Tetapi pada saat mencaplok dan menutup jalan hidup bagi perusahaan lain dan mendikte masyarakat dengan tarif monopolistis, saat itulah sistem politik ekonomi Barat akan menyatakan stop, dilarang menyalahgunakan kebebasan dan prestasi tersebut walaupun dari keringat sendiri, untuk menghalangi kebebasan kreatif orang lain. Tindakan itu akan dikenakan Undang-Undang Antimonopoli. Yang bersangkutan harus membatalkan atau mengurangi keterlibatan dan porsi pangsa pasarnya. Tidak peduli apakah yang bersangkutan kaya dan besar dari keringat sendiri, tetapi pada saat unit bisnis yang ada melakukan praktek-praktek keserakahan sepihak, masyarakat tidak bisa mentolerir sehingga yang bersangkutan harus menghentikan dan membatalkan

---

7. Christanto Wibisono. "Anatomi Konglomerat Indonesia," Konglomerat Indonesia. Kwik Kian Gie dan B.N. Marbun (Jakarta, 1990). hal. 23.

tersebut. ternyata didalamnya tercakup tiga aspek yaitu, bukan hanya masalah hukum ekonomi, tetapi juga masalah etika bisnis dan tanggung jawab sosial dunia usaha. Maka sambil menunggu lahirnya undang-undang antimonopoli itu, kiranya ada beberapa langkahantisipasi yang dapat dilakukan untuk membendung praktek-praktek persaingan tidak sehat ini, yaitu melalui optimalisasi penerapan etika bisnis dan peranan koperasi sebagai soko guru perekonomian bangsa.

**Didik J Rachbini**<sup>9</sup> menyatakan bahwa masalah etika bisnis memang sangat luas, tetapi rasanya tidak cukup untuk mengunci persoalan penyimpangan-penyimpangan yang telah berlangsung selama ini. Jika kita lihat kasus-kasus yang muncul di hadapan masyarakat dan sangat mengusik rasa keadilan publik, maka pemecahan yang tepat tidak saja berada dalam lingkup etika saja. Hal ini diperkuat lagi dengan banyaknya masalah-masalah etika bisnis, yang akhirnya masuk ke lingkup hukum ekonomi yang memerlukan **law enforcement** tersendiri.

Beberapa analisis ekonomi telah menunjukkan bahwa pada dasarnya sifat yang kompetitif dalam sistem pasar yang berlaku tidak selamanya buruk, hal itu akan menjadi buruk apabila disertai oleh peranan kapital yang sangat dominan. Peranan kapital yang sangat dominan akan membuka peluang bagi perkembangan kekuatan monopoli. Oleh karena itu koperasi menjadi salah satu cara dan pilihan yang dapat dipakai untuk menghilangkan monopoli yang merugikan konsumen.

Optimalisasi peranan koperasi untuk menghilangkan monopoli yang merugikan konsumen sangat mungkin untuk dilakukan. **M. Dawam Rahardjo**<sup>10</sup> mengatakan bahwa dalam koperasi modal dimiliki oleh anggota koperasi yang besar

---

9. Didik J Rachbini. "Etika Bisnis dan Masalah Pelembagaan Hukum Ekonomi," Kompas (Jakarta, 2 November 194), hal. 4.

10. M. Dawam Rahardjo. "Koperasi dan Monopoli," Sistem Ekonomi dan Demokrasi Ekonomi. Sri Edi Swasono (Jakarta, 1987), hal. 263.

Jumlahnya. Hasilnya akan dinikmati secara langsung atau tak langsung oleh para anggota. Melalui organisasi koperasi yang demokratis, para anggota dapat mengontrol penggunaan dan pemanfaatannya. Lebih lanjut melalui contoh perbandingan dengan negara lain dipaparkannya<sup>11</sup>, bahwa di Indonesia, pompa-pompa bensin pada umumnya, kalau tidak semuanya, dimiliki oleh sekelompok orang. Padahal bensin adalah kebutuhan sehari-hari yang vital bagi pemilik kendaraan. Pasarannya sangat luas, sehingga usaha di bidang ini akan sangat menguntungkan. Alangkah beruntungnya mereka yang memiliki perusahaan pompa bensin. Di Kanada, para konsumen bensin membentuk koperasi. Karena perusahaan itu adalah milik anggota, maka mereka bisa menentukan, atau lebih tepat, memusyawarahkan soal harga. Sifat "monopoli" disitu adalah justru untuk mencegah monopoli yang hanya menguntungkan segelintir orang yang merugikan orang banyak.

Contoh sebagaimana digambarkan di atas telah menunjukkan bahwa dengan potensi ekonomi semacam itu, proses pembentukan modal dari bawah akan dapat secara cepat dilaksanakan sehingga dapat menggantikan pola pembentukan modal semacam melalui monopoli.

Melalui optimalisasi ketiga aspek diatas, yaitu hukum ekonomi, etika bisnis dan tanggung jawab dunia usaha, diharapkan berbagai penyimpangan dalam dunia bisnis dapat ditanggulangi, sehingga pada akhirnya akan dapat mewujudkan cita-cita nasional, yaitu membentuk masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945.

---

11. Ibid.

## PENUTUP

Sebagai penutup ada beberapa kesimpulan yang dapat ditarik, yaitu:

1. Praktek monopoli dan persaingan tidak sehat lainnya telah mengakibatkan kerugian pada masyarakat luas karena masyarakat atau konsumen harus membayar harga produk yang dibelinya lebih mahal.
2. Kebijakan tata niaga yang telah dikeluarkan pemerintah mengakibatkan tata niaga yang ada cenderung mengarah pada monopoli dan oligopoli, oleh karena pemerintah perlu segera mengkaji ulang kebijakan tata niaga yang ada dan mengeluarkan kebijakan tata niaga yang baru.
3. Untuk mencegah praktek-praktek monopoli dan persaingan tidak sehat lainnya, sudah waktunya pembuat kebijakan legislatif mengeluarkan undang-undang antimonopoli.

## DAFTAR PUSTAKA

Gie, Kwik Kian dan B.N. Marbun. Konglomerat Indonesia. Jakarta:Pustaka Sinar Harapan, 1993.

Rachbini, Didik J. Membangun Pranata Ekonomi Menengah dan Bawah. Jakarta:Kompas, 23 Agustus 1994.

Rachbini, Didik J. Etika Bisnis dan Masalah Pelembagaan Hukum Ekonomi. Jakarta:Kompas, 2 November 1994.

Suara Merdeka. 12 September 1995.

Suara Merdeka. 15 September 1995.

Susanto, I.S. Diktat Kriminologi. Semarang: Akpol, 1992.

Susanto, I.S. Kejahatan Korporasi. Semarang: FH UNDIP, 1993.

Susanto, I.S. Perlukah UU Antimonopoli ? Semarang: Suara Merdeka, 26 Oktober 1993.

Swasono, Sri Edi. Sistem Ekonomi dan Demokrasi Ekonomi. Jakarta: UI Press, 1987.